

BAB I

PENDAHULUAN

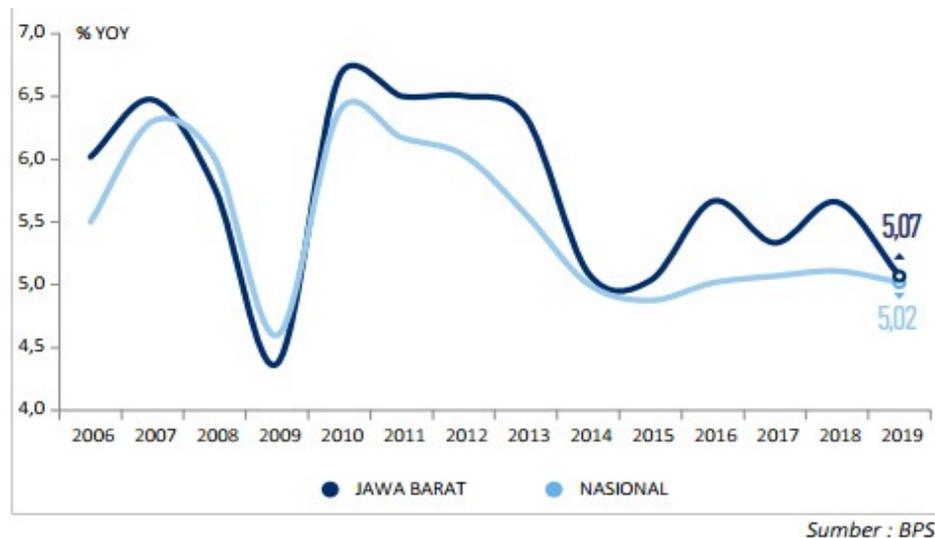
A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian, kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan ekonomi untuk penduduknya. Pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh tiap-tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sama halnya dengan PDB, yang menjadi tolok ukur nilai PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. Nilai PDRB inilah yang akan menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut (Octavianingrum, 2015)

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa. Jumlah penduduk Jawa barat sendiri ada sekitar 37.548.565 jiwa, dengan

tingkat pertumbuhan sebesar 2,14% pertahun. Dan Jawa barat memiliki tenaga pekerja berpendidikan sebanyak 15,7juta jiwa atau 18% dari jumlah nasional. Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel dan restoran (22,5%) dan sektor jasa (29%). Provinsi ini juga menyumbang hampir 1/4 dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non migas, Ekspor utama tekstil sekitar 55,45% dari total ekspor Jawa barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 5,07% (yoy), melambat dibanding tahun 2018 (5,66%, yoy). Namun demikian, realisasi ini masih lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02% (yoy). Perlambatan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang AS-China yang menahan kinerja ekspor dan industri pengolahan akibat perlambatan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Selain itu perlambatan juga dipengaruhi oleh dampak based year, dimana tahun 2018 lebih banyak faktor pendorong pertumbuhan yang sulit diimbangi di tahun 2019. Penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) 2019 tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2019 dibanding pelaksanaan Pilkada serentak di 16 Kabupaten/Kota dan Pilgub Jawa Barat dan penyelenggaraan 5 (lima) cabang olahraga Asian Games di tahun 2018. Namun demikian, permintaan domestik masih kuat seiring dengan rata-rata kenaikan UMK sebesar 8,11%. Selain itu, penyaluran bantuan sosial pada tahun 2019 tercatat lebih tinggi dibanding tahun 2018. Penyaluran bansos PKH tercatat meningkat sebesar 85%, sementara itu penyaluran bansos BPNT meningkat sebesar 17%. Hal ini turut mendorong pendapatan masyarakat pada tahun 2019 (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat 2019).



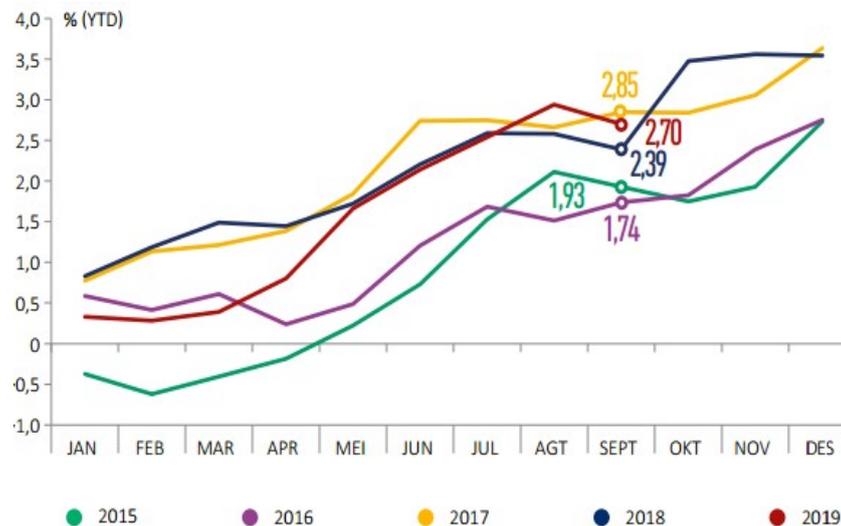
Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2019 tertahan oleh melambatnya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), serta investasi. Konsumsi swasta meskipun melambat, namun tercatat masih kuat. Pengaruh melambatnya konsumsi swasta adalah efek based year di tahun 2018, dimana penyelenggaraan Pilkada mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi. Di sisi lain, investasi juga mengalami perlambatan, seiring dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 yang membuat tingkat kepercayaan investor menurun, sehingga investor lebih memilih untuk wait and see hingga situasi politik lebih stabil.

Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen penting dalam menganalisis tingkat perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi bisa juga diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi selalu ada dan terjadi pada negara Indonesia, inflasi juga mempunyai peranan penting dalam suatu perekonomian, tingkat inflasi dapat digunakan untuk mengukur kestabilan harga dalam ekonomi (Achsani dkk, 2010).

Menurut Sukirno (2012) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi untuk PMDN di Jawa Barat tahun 2017, yang ditanamkan oleh para investor sebesar Rp. 9.102.212.770.000 naik Rp. 3.017.106.870.000 dari periode investasi yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.085.105.900.000, jumlah tenaga kerja sebesar 7.630 orang menurun 5.292 orang dari periode yang sama tahun 2016 sebesar 12.922 orang, untuk jumlah proyek sebesar 180 proyek atau turun 16 proyek dari 196 proyek pada periode yang sama tahun 2016. Lokasi yang paling besar Jumlah investasi di Jawa Barat, ditanamkan di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 3.138.620.450.000 atau 34,48%. Sektor yang paling besar Jumlah investasi di Jawa Barat, ditanamkan pada sektor tersier, bidang usaha Transportasi, gudang & komunikasi Rp. 1.935.821.650.000,- atau 21,27% (<https://dpmptsp.jabarprov.go.id> diakses 13 Februari 2020).

Inflasi Jawa Barat masih terkendali dan berada pada rentang sasaran inflasi $3,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 3,85% (yoy), masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional tahun 2019. Realisasi ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2018 yang sebesar 3,17% (yoy) dan realisasi triwulan II 2019 yang sebesar 3,48% (yoy). Dibandingkan dengan inflasi IHK nasional sebesar 3,39% (yoy), inflasi IHK Jawa Barat juga tercatat lebih tinggi (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat November 2019).

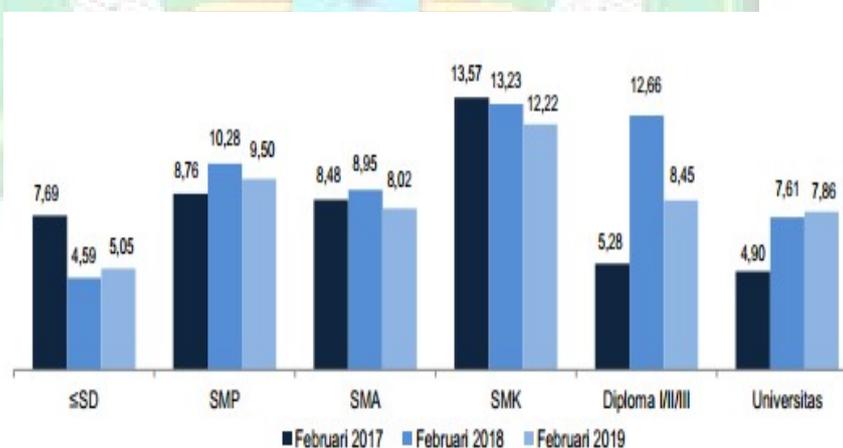


Gambar 1.2
Inflasi Kumulatif di Provinsi Jawa Barat

Secara kumulatif Januari hingga September 2019, inflasi Jawa Barat pada triwulan III 2019 tercatat dalam level kedua tertinggi bila dibandingkan dengan realisasi inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapun faktor penyumbang inflasi pada triwulan ini terutama berasal dari kelompok Pendidikan, Rekreasi, Olahraga, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, serta Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat November 2019).

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Arsyad, 2015). Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 23,83 juta orang, naik 1,06 juta orang dibanding Februari 2018. Komponen pembentuk

angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2019, sebanyak 21,99 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 1,84 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,08 juta orang, sedangkan pengangguran berkurang 15,67 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Februari 2018 sebesar 8,16 persen turun menjadi 7,73 persen pada Februari 2019. Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan. Pada Februari 2019, TPT di wilayah perkotaan sebesar 8,07 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan sebesar 6,65 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, baik di perkotaan maupun di perdesaan TPT mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,57 persen poin dan 0,11 persen poin (Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat 2019).



Gambar 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 12,22 persen. TPT tertinggi berikutnya adalah

pada tingkat SMP 9,50 persen, di ikuti Diploma I/II/III dengan 8,45 persen, dan SMA 8,02 persen, serta Universitas 7,86 persen dan tingkat SD 5,05 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMP. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 5,05 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, peningkatan TPT hanya terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Universitas, sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya menurun (Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat 2019).

Tingginya investasi serta dengan tingkat inflasi yang fluktuatif, dan pengangguran yang sedikit menurun maka penulis ingin mengetahui keterkaitan antara Investasi, Inflasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan masalah diatas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan hasil penelitian ini penulis susun dalam bentuk skripsi berjudul **“PENGARUH INVESTASI, INFLASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2019 melambat dibandingkan triwulan II 2019. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat triwulan III 2019 sebesar 5,14% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2019 yang mencapai 5,70% (yoy).
2. Realisasi investasi untuk PMDN di Jawa Barat tahun 2017, yang ditanamkan oleh para investor sebesar Rp. 9.102.212.770.000 naik Rp. 3.017.106.870.000 dari periode investasi yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.085.105.900.000,

3. Secara kumulatif Januari hingga September 2019, inflasi Jawa Barat pada triwulan III 2019 tercatat dalam level kedua tertinggi bila dibandingkan dengan realisasi inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapun faktor penyumbang inflasi pada triwulan ini terutama berasal dari kelompok Pendidikan, Rekreasi, Olahraga, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, serta Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.
4. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 12,22 persen. TPT tertinggi berikutnya adalah pada tingkat SMP 9,50 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMP

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, dan karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam lagi maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun cangkupan lingkup bidang dari penulis fokus terhadap pengaruh investasi, inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada investasi, inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan, sebagai literature yang menyajikan informasi umumnya mengenai pengaruh investasi, inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai analisis pengaruh investasi, inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan dalam ilmu pengetahuan, referensi dan masukan umumnya yang mengenai investasi, inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, khususnya berkaitan dengan analisis pengaruh investasi, inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab II berisi landasan teori yang dimulai dengan kajian teori. Setelah kajian teori kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab III sebagai gambaran proses penelitian di lapangan disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang dimaksud meliputi: pendekatan dan jenis penelitian; sasaran, lokasi, dan waktu penelitian; operasional variabel penelitian; jenis data; sumber data; teknik pengumpulan data; populasi dan sampel; instrumen penelitian; teknis analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV yang menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan analisis data.

BAB V : Penutup

Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu sub bab saran berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

